

# EVALUASI KINERJA DITJEN HORTIKULTURA TAHUN 2019



## KATA PENGANTAR

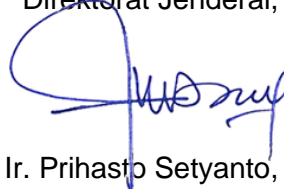
Evaluasi Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2019 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama tahun 2019, yang dijabarkan dalam Visi, Misi, Tujuan, serta Sasaran Program dan Kegiatan yang diemban Direktorat Jenderal Hortikultura sebagai wujud pelaksanaannya.

Secara umum laporan ini menyajikan berbagai capaian kegiatan pembangunan Hortikultura sepanjang tahun 2019 serta pada masing-masing unit Eselon II dalam rangka mewujudkan program peningkatan produksi dan nilai tambah hortikultura. Namun demikian, laporan ini juga memuat permasalahan dan kendala dalam pencapaian target – target yang telah ditetapkan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerjasama dengan baik dan mendukung pencapaian Direktorat Jenderal Hortikultura selama ini.

Semoga Evaluasi Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2019 ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan pembangunan hortikultura di masa yang akan datang.

Jakarta, Januari 2020  
Direktorat Jenderal,



Dr. Ir. Prihaso Setyanto, M.Sc

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Komoditas hortikultura menjadi salah satu komoditas pertanian yang cukup diminati pasar. Hal ini dipengaruhi oleh semakin tingginya kesadaran konsumen akan arti penting komoditas hortikultura yang tidak hanya sebagai bahan pangan, tetapi juga mempunyai kontribusi kepada aspek kesehatan, estetika dan lingkungan.

Pada tahun 2019 Direktorat Jenderal Hortikultura melaksanakan satu program yaitu Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Nilai Tambah Hortikultura. Program tersebut merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan visi dan misi Kementerian Pertanian dalam mewujudkan ketahanan pangan dan gizi serta meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian. Selain itu, program tersebut merupakan kelanjutan dari program tahun sebelumnya sesuai Renstra 2014-2019. Kegiatan utama yang dilaksanakan dalam program di atas meliputi: 1) Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat; 2) Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura; 3) Pengembangan Sistem Perlindungan Hortikultura; 4) Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura; 5) Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura; dan 6) Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura.

Kegiatan Ditjen Hortikultura pada tahun 2019 difokuskan pada komoditas untuk peningkatan produksi pangan strategis, peningkatan produksi komoditas bernilai tambah, peningkatan produksi komoditas substitusi impor serta promosi ekspor. Komoditas untuk peningkatan produksi yaitu bawang merah dan aneka cabai. Komoditas promosi ekspor yaitu mangga, manggis, nenas, pisang, salak, krisan, kentang, jamur, dan jahe. Sementara, komoditas substitusi impor yaitu jeruk dan bawang putih.

Dukungan anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura tahun 2019 berupa APBN Sektoral. APBN Sektoral dialokasikan pada 86 Satker (1 Satker Pusat Ditjen Hortikultura, 34 Satker Dekonsentrasi, 33 Satker Tugas Pembantuan Provinsi, 18 Satker Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota).

Laporan Evaluasi Kinerja Tahun 2019 disusun untuk memberikan gambaran terkait capaian kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura selama tahun 2019. Pokok-pokok materi didalamnya memuat capaian kinerja, pelaksanaan program kegiatan, realisasi serapan anggaran, serta permasalahan dan saran tindak lanjut.

## **1.2. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup pembahasan dalam Laporan Evaluasi Kinerja 2019 adalah kinerja pembangunan hortikultura baik terhadap ekonomi makro maupun capaian kinerja kegiatan pengembangan hortikultura tahun 2019. Hasil evaluasi ini merupakan salah satu bahan yang dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan hortikultura pada tahun yang akan datang.

## I. KINERJA MAKRO SUBSEKTOR HORTIKULTURA TAHUN 2019

### 2.1. Produksi

Produksi komoditas hortikultura tahun 2019 didasarkan pada angka sementara yang bersumber dari Direktorat Jenderal Hortikultura dan Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (BPS RI) sedangkan target berdasarkan Renstra Kementerian Pertanian Revisi II. Untuk lebih jelasnya, rincian komoditas untuk peningkatan produksi, komoditas ekspor dan substitusi impor disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1. Target dan Realisasi Produksi Komoditas Hortikultura Tahun 2019

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Target	Realisasi	%
1.	Terpenuhinya kebutuhan pangan strategis tanaman hortikultura			
	a. Produksi cabai	2.295.481	2.588.633	112,77
	b. Produksi bawang merah	1.495.993	1.580.243	105,63
2.	Terpenuhinya kebutuhan tanaman buah dan florikultura untuk ekspor dan substitusi impor (ton)			
	a. Mangga (ton)	2.060.689	2.808.936	136,31
	b. Nenas (ton)	1.537.414	2.196.456	142,87
	c. Manggis (ton)	182.317	246.476	135,19
	d. Salak (ton)	824.304	955.763	115,95
	e. Pisang (ton)	7.176.263	7.280.659	101,45
	f. Jeruk (substitusi impor/ton)	2.392.649	2.444.516	102,17
	g. Krisan (tangcai)	452.401.340	465.359.952	102,86
3	Terpenuhinya tanaman sayuran dan tanaman obat untuk komoditas ekspor dan substitusi impor			
	a. Kentang (ton)	1.508.623	1.314.654	87,14
	b. Jamur (ton)	41.160	33.163	80,57
	c. Jahe (ton)	345.472	174.380	50,48
	d. Bawang putih (substitusi impor/ton)	125.951	88.817	70,52

Sumber : Ditjen Hortikultura dan BPS RI, 2020

Pada Tahun 2019, sebagian besar realisasi produksi melebihi target, baik komoditas untuk peningkatan produksi maupun pada komoditas promosi ekspor dan substitusi impor. Komoditas untuk peningkatan produksi yaitu

bawang merah dan aneka cabai. Komoditas promosi ekspor meliputi mangga, manggis, nenas, salak, pisang, krisan, kentang, jahe dan jamur. Sementara, komoditas substitusi impor yaitu jeruk dan bawang putih. Oleh karenanya, pengembangan komoditas tersebut diperlukan manajemen pola tanam guna menjaga stabilitas produksi dan harga terutama pada Hari Besar Keagamaan Nasional dan Tahun Baru sangat penting.

Capaian kinerja sasaran strategis yang masuk dalam kategori sangat berhasil atau memenuhi target adalah produksi cabai (112,07%), bawang merah (105,11%), mangga (132,76%), nenas (149,23%), manggis (132,91%), salak (114,70%), pisang (100,06%), dan krisan (117,21%), sementara komoditas yang berhasil atau mendekati target adalah indikator kinerja produksi kentang (86,24%). Sementara, indikator produksi yang jauh di bawah target yang ditetapkan/cukup berhasil adalah bawang putih (70,22%), sedangkan indikator kinerja yang kurang berhasil adalah produksi jamur (0,78%) dan jahe (50,33%).

Realisasi produksi jamur dan jahe rendah dikarenakan banyaknya petani yang beralih ke komoditas lain. Hal ini terjadi karena permintaan pasar terhadap kedua komoditas tersebut turun sehingga berdampak pada harga pasar yang rendah.

Faktor lain penyebab tidak tercapainya target produksi sayuran dan tanaman obat adalah masih adanya dampak perubahan iklim yang tidak menentu dengan frekuensi curah hujan yang cukup tinggi sehingga mempengaruhi umbi dan daun tanaman. Selain itu, adanya serangan OPT juga menyebabkan produksi turun.

## 2.2. Luas Panen

Kegiatan ekstensifikasi melalui pengembangan kawasan dilakukan di daerah sentra produksi dan daerah potensi. Hal ini untuk menjaga stabilitas produksi dan harga di seluruh daerah di Indonesia. Berdasarkan angka sementara, luas panen komoditas untuk peningkatan produksi, komoditas ekspor dan substitusi impor dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. Perbandingan Luas Panen Komoditas Untuk Peningkatan Produksi, Komoditas Ekspor, dan Substitusi Impor Tahun 2019 dan 2018.

No.	Komoditas	Luas Panen (Ha)		Pertumbuhan (%)
		2019	2018	
1.	Terpenuhinya kebutuhan pangan strategis tanaman hortikultura			
	a. Cabai	300.377	310.443	-3,24
	b. Bawang merah	159.195	156.779	1,54

No.	Komoditas	Luas Panen (Ha)		Pertumbuhan (%)
		2019	2018	
2.	Terpenuhinya kebutuhan tanaman buah dan florikultura untuk ekspor dan substitusi impor (ton)			
	a. Mangga	284.293	206.904	37,40
	b. Nenas	27.750	23.151	19,87
	c. Manggis	29.573	23.436	26,19
	d. Salak	27.050	23.807	13,62
	e. Pisang	105.799	85.698	23,46
	f. Jeruk (substitusi impor )	66.303	50.682	30,82
	g. Krisan	1.022	1.110	-7,93
3	Terpenuhinya tanaman sayuran dan tanaman obat untuk komoditas ekspor dan substitusi impor			
	a. Kentang	68.223	68.683	-0,67
	b. Jamur	462	440	5,00
	c. Jahe	8.077	10.196	-20,78
	d. Bawang putih (substitusi impor)	12.280	5.013	144,96

*Sumber : Ditjen Hortikultura dan BPS RI, 2020*

Jika angka sementara 2019 dibandingkan dengan angka tetap 2018, maka komoditas untuk peningkatan produksi yang menurun pertumbuhan luas panennya adalah cabai sebesar 2,65 %. Komoditas promosi ekspor yang mengalami penurunan luas panen adalah krisan sebesar 7,92%, kentang sebesar 0,67% dan jahe sebesar 26,5%, sedangkan komoditas substitusi impor pertumbuhan luas panennya meningkat sebesar 29,58% untuk jeruk dan 1.227,9% untuk bawang putih.

### 2.3. Produk Domestik Bruto (PDB)

Produk Domestik Bruto yang digunakan disini adalah Produk Domestik Bruto Subsektor Hortikultura. Produk Domestik Bruto dibagi dua yaitu Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Perbedaan keduanya adalah Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku digunakan untuk menghitung kontribusi sedangkan Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan digunakan untuk menghitung pertumbuhan ekonomi. Pada laporan tahunan ini digunakan Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2019 (angka sementara). Untuk melihat kontribusi subsektor hortikultura dibanding subsektor lain terhadap sektor pertanian Tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Kontribusi Subsektor Hortikultura dibanding Subsektor Lain Terhadap Sektor Pertanian Tahun 2019

No	Subsektor	Miliar (Rp)**	Kontribusi (%)
1	Tanaman Pangan	446.870	22,19
<b>2</b>	<b>Tanaman Hortikultura</b>	<b>238.830</b>	<b>11,86</b>
3	Tanaman Perkebunan	517.508	25,70
4	Peternakan	257.008	12,76
5	Jasa Pertanian dan Perburuan	29.307	1,46
6	Kehutanan dan Penebangan Kayu	104.122	5,17
7	Perikanan	419.982	20,86
<b>Sektor Pertanian</b>		<b>2.013.627</b>	<b>100,00</b>

Sumber : BPS (diolah oleh PUSDATIN), 2020

\*\* Sangat Sementara

Pada Tahun 2019, kontribusi subsektor hortikultura terhadap PDB Pertanian sebesar 11,86%, menempati peringkat kelima dari tujuh subsektor di sektor pertanian setelah tanaman perkebunan (25,70%), tanaman pangan (22,19%), perikanan (20,86%), dan peternakan (12,76%). Masih rendahnya kontribusi subsektor hortikultura disebabkan oleh masih kurangnya promosi untuk komoditas ekspor sehingga berdampak pada rendahnya pendapatan di subsektor hortikultura. Selain itu, yang tak kalah pentingnya untuk meningkatkan PDB subsektor hortikultura adalah dengan mengurangi impor dan pengembangan kawasan baru di luar daerah sentra produksi.

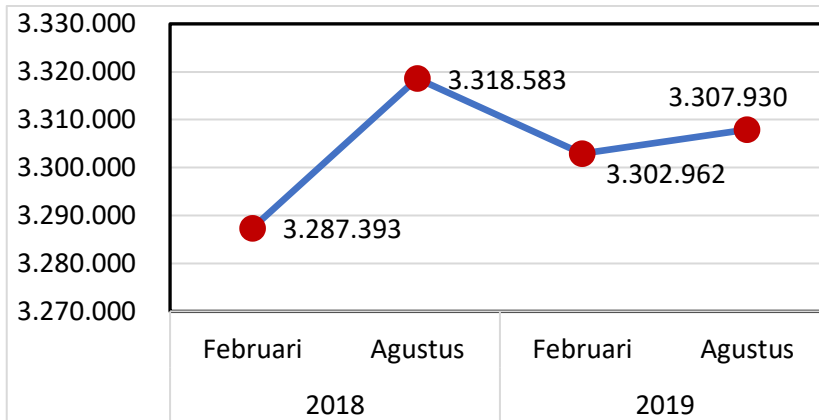
Dalam beberapa tahun terakhir kegiatan lebih ditekankan pada peningkatan produksi guna memenuhi kebutuhan dalam negeri seperti pada komoditas cabai dan bawang merah. Sementara, untuk komoditas promosi ekspor seperti mangga, manggis, nenas, salak, pisang, kentang, jamur, jahe dan krisan perlu mendapat perhatian khusus dalam meningkatkan produksinya. Caranya dengan melakukan kegiatan intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi serta dengan melakukan pembinaan kepada petani tentang cara berbudidaya yang baik dan benar sesuai SOP.

#### 2.4. Tenaga Kerja

Tenaga kerja yang dimaksud disini adalah tenaga kerja yang bekerja di subsektor hortikultura. Untuk data tenaga kerja, BPS RI setiap tahun melakukan dua kali pencatatan yaitu bulan Februari dan Agustus. Khusus Tahun 2019, penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja di sub sektor hortikultura pada bulan Agustus 2019 sebesar 3.302.962 orang dibanding bulan Februari



2019 sebesar 3.307.930 orang atau mengalami pertumbuhan sebesar 0,15%. Apabila dibandingkan secara year to year bulan Februari 2019 terhadap bulan Februari 2018 mengalami pertumbuhan sebesar 2,47%. Tetapi, bulan Agustus 2019 terhadap bulan Agustus 2018 mengalami penurunan pertumbuhan sebesar 0,32%. Rincian lengkapnya bisa dilihat pada gambar berikut.



Sumber: BPS RI, 2020

Gambar 1. Tenaga Kerja Hortikultura

## 2.5. Ekspor dan Impor Komoditas Hortikultura

Ekspor dan impor komoditas subsektor hortikultura mencakup produk segar dan olahan. Data ekspor dan impor menggunakan kode *Harmonized System* (HS) tahun 2019 dengan komoditas ekspor utama yaitu mangga, manggis, nenas, pisang, salak, kentang, jamur, jahe dan krisan. Sedangkan data impor meliputi komoditas jeruk dan bawang putih, kedua komoditas ini merupakan komoditas substitusi impor. Untuk melihat volume dan nilai ekspor dan impor komoditas sub sektor hortikultura tahun 2018 dan 2019 dapat dilihat pada Tabel 4 berikut.

Tabel 4. Ekspor dan Impor Komoditas Hortikultura Tahun 2018 dan 2019

No	Komoditas	2018		2019		Pertumbuhan (%)	
		Vol (Ton)	Nilai (US\$)	Vol (Ton)	Nilai (US\$)	Vol.	Nilai
	<b>Ekspor</b>						
1	Mangga	2.518	2.511.095	2.470	3.461.950	-1,90	37,87
2	Manggis	32.170	27.953.516	27.797	42.630.354	-13,59	52,50
3	Nanas	211.316	178.362.986	236.226	203.819.057	11,79	14,27
4	Pisang	26.935	13.228.502	22.745	11.344.688	-15,55	-14,24
5	Salak	1.148	1.306.071	1.698	1.890.836	47,94	44,77

No	Komoditas	2018		2019		Pertumbuhan (%)	
		Vol (Ton)	Nilai (US\$)	Vol (Ton)	Nilai (US\$)	Vol.	Nilai
6	Kentang	4.746	4.278.523	4.855	6.050.664	2,30	41,42
7	Jamur	3.872	6.722.803	2.292	4.625.225	-40,81	-31,20
8	Jahe	3.071	3.361.783	4.445	4.933.160	44,72	46,74
9	Krisan	57	780.716	48	700.045	-16,11	-10,33
	<b>Impor</b>						
10	Jeruk	95.967	153.310.740	2.079	1.544.819	-97,83	-98,99
11	Bawang Putih	587.942	507.701.456	53	54.749	-99,99	-99,99

*Sumber : BPS RI, 2020*

Pada Tahun 2019, komoditas yang mengalami penurunan pertumbuhan volume ekspor adalah mangga (1,90%), manggis (13,59%), pisang (15,55%), jamur (40,81%), dan krisan (10,33%). Sementara komoditas substitusi impor yang menurun pertumbuhan volume impornya adalah jeruk (98,99%) dan bawang putih (99,99%). Menurunnya volume dan nilai ekspor komoditas hortikultura antara lain dipengaruhi oleh nilai tukar, pertumbuhan ekonomi dunia, harga komoditas dunia dan kebijakan perdagangan suatu negara. Namun, menurunnya nilai tukar tidak langsung dapat meningkatkan nilai ekspor jika kualitas produk tidak dapat ditingkatkan sesuai dengan permintaan pasar ekspor. Dalam rangka meningkatkan nilai ekspor, pemerintah Indonesia harus melakukan peningkatan kualitas dan variasi produk serta mencari pangsa pasar baru. Selain itu, pemerintah juga harus memberikan subsidi kepada komoditas ekspor.

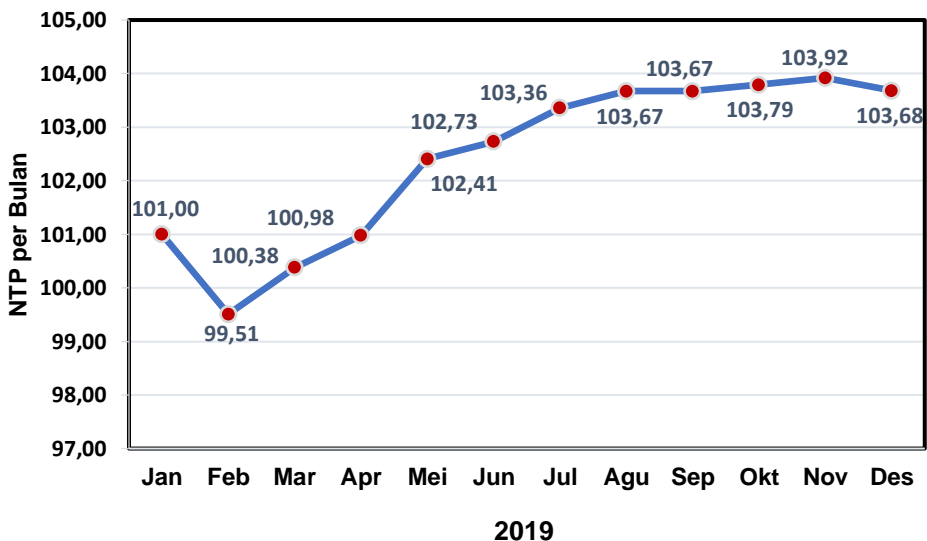
Direktorat Jenderal Hortikultura selain berusaha meningkatkan ekspor komoditas hortikultura, juga berusaha menurunkan impor untuk 2 (dua) komoditas yaitu jeruk dan bawang putih. Untuk jeruk mengalami penurunan sebesar 20,26 % pada tahun 2019 seiring dengan semakin meningkatnya produksi jeruk dalam negeri sebagai komoditas substitusi impor. Peningkatan produksi jeruk dilakukan dengan melakukan pengembangan kawasan jeruk sehingga dapat mencukupi kebutuhan dan konsumsi masyarakat Indonesia, sekaligus sebagai substitusi impor.

Terkait dengan impor hasil pertanian Indonesia yang masih tinggi sebagai akibat dari tingginya permintaan untuk keperluan konsumsi, benih dan bahan baku industri. Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengurangi impor produk hortikultura adalah dengan membina petani untuk membudidayakan komoditas impor, pemberian subsidi dan adanya jaminan harga jual sangat diharapkan dalam mendorong petani untuk membudidayakan komoditas hortikultura. Pemberlakuan sistem kuota impor juga sangat membantu petani

dalam menghadapi serbuan produk impor yang jauh lebih murah dibanding produk dalam negeri.

## 2.6. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator untuk dapat mengukur tingkat kesejahteraan petani. NTP adalah rasio antara indeks harga yang diterima petani (It) dengan indeks yang dibayarkan petani (Ib) dalam persentase. Secara konseptual, NTP adalah pengukur kemampuan tukar barang-barang (produk) pertanian yang dihasilkan petani dengan barang/jasa yang diperlukan untuk konsumsi rumah tangga dan keperluan dalam memproduksi produk pertanian. Untuk lebih jelasnya, NTP tahun 2019 seperti pada gambar berikut.



Sumber : BPS RI 2020, diolah

Gambar 2. Nilai Tukar Petani Hortikultura Tahun 2019

Nilai tukar petani dari bulan Januari sampai Desember 2019 cenderung meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan petani meningkat seiring dengan meningkatnya nilai tukar petani hortikultura.

## 2.7. Konsumsi

Konsumsi komoditas hortikultura yang dimaksud adalah konsumsi per kapita buah dan sayur dalam rumah tangga setahun. Data konsumsi diperoleh dari BPS melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS). Rincian data konsumsi per kapita buah dan sayur tahun 2019 ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 5. Konsumsi per Kapita Buah dan Sayur dalam Rumah Tangga Tahun 2019

Buah	2019	Sayur	2019
Jeruk		Bayam	
- Kuantitas (Kg)	4,43	- Kuantitas (Kg)	3,39
		Kangkung	
Mangga		- Kuantitas (Kg)	3,81
- Kuantitas (Kg)	0,47	Kol/kubis	
		- Kuantitas (Kg)	1,50
Alpoket		Sawi Putih(Petsai)	
- Kuantitas (Kg)	-	- Kuantitas (Kg)	1,01
Rambutan		Sawi Hijau	
- Kuantitas (Kg)	3,65	- Kuantitas (Kg)	1,36
Duku		Buncis	
- Kuantitas (Kg)	4,07	- Kuantitas (Kg)	0,89
Durian		Kacang Panjang	
- Kuantitas (Kg)	1,67	- Kuantitas (Kg)	2,29
Salak		Tomat sayur	
- Kuantitas (Kg)	1,62	- Kuantitas (Kg)	2,35
Nanas		Wortel	
- Kuantitas (Kg)	-	- Kuantitas (Kg)	1,30
Pisang Ambon		Mentimun	
- Kuantitas (Kg)	-	- Kuantitas (Kg)	2,02
Pisang Raja		Daun Ketela Pohon	
- Kuantitas (Kg)	-	- Kuantitas (Kg)	2,71
Pisang lainnya		Terong	
- Kuantitas (Kg)	5,11	- Kuantitas (Kg)	2,82
Pepaya		Tauge	
- Kuantitas (Kg)	3,02	- Kuantitas (Kg)	0,89
		Labu	
Jambu		- Kuantitas (Kg)	1,83
- Kuantitas (Kg)	-	Jagung muda kecil	
		- Kuantitas (Kg)	-
Sawo			
- Kuantitas (Kg)	-	Sayur sop/cap cay	
		- Kuantitas (Bungkus)	8,86
Belimbing			

Buah	2019	Sayur	2019
- Kuantitas (Kg)	-	Sayur asam/lodeh	
		- Kuantitas (Bungkus)	4,85
Semangka			
- Kuantitas (Kg)	1,72	Nangka muda	
		- Kuantitas (Kg)	0,52
Nangka			
- Kuantitas (Kg)	-	Pepaya muda	
		- Kuantitas (Kg)	1,04
		Jamur	
		- Kuantitas (Ons)	-
		Petai	
		- Kuantitas (Ons)	-
		Jengkol	
		- Kuantitas (Kg)	0,05
		Bawang merah	
		- Kuantitas (Kg)	2,80
		Bawang putih	
		- Kuantitas (Kg)	1,80
		Cabe merah	
		- Kuantitas (Kg)	0,20
		Cabe hijau	
		- Kuantitas (Kg)	0,04
		Cabe rawit	
		- Kuantitas (Kg)	0,20
		Sayur dalam kaleng	
		- Kuantitas (Kg)	-
		Lainnya sayur-sayuran	
		- Kuantitas (Kg)	5,01

Sumber : BPS RI, 2019

Tabel 5 menunjukkan bahwa konsumsi per kapita rumah tangga dalam setahun untuk buah seperti jeruk (4,43 kg), mangga (0,47 kg), salak (1,62 kg), sedangkan konsumsi per kapita rumah tangga dalam setahun untuk sayur seperti bawang merah (2,80 kg), bawang putih (1,80 kg), cabe merah (0,20 kg), cabai hijau (0,04 kg) dan cabai rawit (0,20 kg).

## II. CAPAIAN PELAKSANAAN KEGIATAN DITJEN HORTIKULTURA TAHUN 2019

### 3.1. Capaian Kegiatan Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat

Peningkatan produksi sayuran dan tanaman obat yang telah difasilitasi melalui dukungan dana APBN terutama untuk pengembangan kawasan aneka cabai, kawasan bawang merah, kawasan sayuran lainnya (bawang putih, kentang, sayuran daun), kawasan tanaman obat, serta kawasan sayuran dan tanaman obat di wilayah perbatasan. Rincian realisasi target pengembangan kawasan melalui dukungan dana APBN dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Realisasi Target Kegiatan Pengembangan Sayuran dan Tanaman Obat Tahun 2019

Sasaran Strategis	Output	Target (Ha)	Realisasi (Ha)	%
Terpenuhinya kebutuhan konsumsi aneka cabai, bawang merah, sayuran lainnya	1. Kawasan Aneka Cabai	10.100	10.050	99,50
	2. Kawasan Bawang Merah	5.200	5.141	98,87
	3. Kawasan Sayuran Lainnya:	13.728	11.786	85,89
	a. Bawang Putih	9.478	8.420	88,84
	b. Sayuran Daun	155	155	100
	c. Kentang	322	300	93,17
	d. SERASI	3.000	2.238	74,6
	e. #Bekerja	726	673	87,63
	f. OPAL (Unit)	110	98	89,09
	4. Kawasan Sayuran dan Tanaman Obat di Wilayah Perbatasan	200	200	100
5. Kawasan Tanaman Obat	500	470	94	
6. GAP Sayuran dan Tanaman Obat (kelompok)	10	10	100	

Sumber : Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat, 2020

Capaian kinerja Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat secara umum diatas 90 % kecuali untuk kawasan sayuran lainnya terutama pada sub output

kawasan bawang putih, SERASI, kegiatan #Bekerja dan OPAL. Kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1) Kawasan bawang putih

Keterbatasan ketersediaan benih sehingga di beberapa satker dilakukan lelang ulang dan akhirnya gagal lelang. Disamping itu adanya informasi dugaan benih belum patah dorman yang terjadi di Palu, Muaraenim, OKU Selatan dan Humbahas membuat tingkat kehati-hatian Dinas Pertanian menjadi lebih tinggi. Selain itu, beberapa daerah seperti Garut, Majalengka, Lumajang, Magetan, Mojokerto, Sinjai dan Barru melakukan relokasi anggaran, alih komoditas menjadi kentang dan mengembalikan sebagian anggaran karena sudah melewati musim tanam dan benih tidak sesuai dengan spesifikasi teknis.

2) Kegiatan Serasi

Dukungan Hortikultura melalui Program SERASI dialokasikan pada 2 provinsi yaitu Sumatera Selatan (2.000 ha) dan Kalimantan Selatan (1.000 ha). Untuk Sumatera selatan melaksanakan kegiatan Serasi pada 6 kabupaten dari target 9 kabupaten. Serasi di 3 kabupaten tidak dilaksanakan karena pekerjaan infrastruktur lahan belum selesai dilaksanakan hingga akhir tahun berjalan. Sedangkan di Kalimantan selatan dilaksanakan pada 9 kabupaten yang telah selesai proses pembangunan infrastruktur.

3) Kegiatan #Bekerja

Daerah yang realisasi fisik dan keuangannya tidak mencapai target adalah Kabupaten Majalengka. Hal ini disebabkan kegiatan yang terealisasi hanya pengembangan durian, sedangkan kegiatan pengembangan sayuran tidak terealisasi yang disebabkan karena RTMP kurang respon dan ketersediaan lahan yang terbatas.

Namun, karena Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka merupakan satker TP Mandiri Kabupaten, maka tidak memungkinkan untuk dilakukan relokasi ke kabupaten lain karena harus melalui proses revisi DIPA Ditjen Hortikultura yang memerlukan waktu yang lama, sementara waktu yang tersisa kurang lebih 2 bulan sampai dengan akhir tahun 2019.

4) Kegiatan OPAL

Kegiatan OPAL tidak dilaksanakan di 6 Provinsi yaitu Provinsi Kalimantan Utara (2 Unit di Provinsi dan di Kabupaten Nunukan), Maluku (Kabupaten Maluku Tengah), Maluku Utara (Kabupaten Halmahera Selatan) dan Sulawesi Utara (Kabupaten Bolaang Mangondow), Sumatera Utara (3 Unit di Kabupaten Sibolga, Nias dan Toba Samosir) dan Jawa Timur (4 unit terdiri dari 1 unit di provinsi dan 3 unit di Kota Malang, Pasuruan dan Situbondo).

Alasan tidak dilaksanakannya kegiatan tersebut sebagai berikut : Kendala dalam penginputan rencana umum pengadaan (RUP), waktu pelaksanaannya tidak memungkinkan untuk dilaksanakan pada tahun 2019, Jarak dari Provinsi ke Kabupaten penerima bantuan sangat jauh sehingga susah dalam memonitoring kegiatan tersebut, kegiatan yang masih baru dan kurangnya sosialisasi ke Kabupaten/Kota, pemahaman tentang konsep OPAL masih kurang, pemilihan model kontrak masih belum paham, tidak tersedianya dana operasional untuk pelaksanaan OPAL, ketersediaan lahan di area kantor terbatas, kabupaten/kota terlambat mengajukan RAB, kurang memahami mekanisme pencairan dana OPAL dan proses tanam untuk demplot di lapangan menunggu musim hujan, pelaksana lintas SKPD kegiatan OPAL tidak mengerti betul teknis kegiatan di lapangan, setelah OPAL diserahkan dari pihak kedua (penyedia) kepada pihak pertama (instansi pemerintah) tidak ada arah yang jelas untuk tanggung jawab pemeliharaan selanjutnya karena setelah selesai pekerjaan siapa yang melanjutkan (karena dana OPAL dari anggaran dukungan manajemen) dan masih ada daerah yang belum melengkapi laporan pelaksanaan kegiatan dan kelengkapan dokumen ke pusat

Berbagai keberhasilan dan manfaat telah dicapai dalam pelaksanaan pembangunan tanaman sayuran dan tanaman obat tahun 2019, namun dalam pelaksanaannya ditemui berbagai permasalahan dan hambatan, baik dari aspek teknis budidaya maupun aspek manajemen. Beberapa permasalahan dan hambatan yang ditemui adalah sebagai berikut:

#### **A. Aspek Budidaya**

##### **1) Aneka Cabai**

- a. Pengembangan kawasan sudah tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Namun produksi belum bisa dikatakan optimal karena beberapa daerah di Sumatera seperti Sumatera Selatan dan Kepulauan Riau serta di Kalimantan seperti Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat kebutuhannya masih *disupply* dari daerah-daerah sentra di Jawa seperti Jawa Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Skala usaha sempit dan lahan berbentuk spot-spot yang tersebar, sehingga menyulitkan dalam pengumpulan dan distribusi, sementara umur simpan cabai pendek karena sifatnya yang mudah rusak (*perishable*);
- c. Rantai distribusi pemasaran cabai terlalu panjang. Dimulai dari petani kemudian ke pedagang pengumpul, lalu ke pedagang besar, pengadag pengecer baru terakhir ke konsumen. Hal ini berpengaruh terhadap harga yang diterima oleh konsumen jauh lebih tinggi dibanding harga jual di tingkat petani.



- d. Sistem budidaya masih dilakukan secara konvensional/tradisional, dimana sangat tergantung pada musim, sehingga ketersediaan produk tidak merata sepanjang tahun, khususnya pada bulan-bulan di luar musim;
- e. Berkurangnya produksi di awal tahun 2020 disebabkan mundurnya jadwal tanam dikarenakan mundurnya musim hujan. Petani seharusnya menanam pada bulan September-Oktober menjadi mundur ke bulan November bahkan Desember karena menunggu turunnya hujan untuk memastikan ketersediaan air pada tanaman cabai;
- f. Kemampuan adopsi teknologi budidaya terbaru, misalnya teknik budidaya di luar musim dengan *screen house* masih terbatas, baik dari sisi SDM pelakunya, biaya dan dukungan kebijakan pemerintah, sehingga belum sepenuhnya berorientasi pada kebutuhan konsumen;
- g. Penerapan GAP/SOP budidaya belum optimal, sehingga tuntutan pasar/konsumen terhadap produk yang bermutu, aman dikonsumsi dan diproduksi dengan cara yang ramah lingkungan belum sepenuhnya dapat dipenuhi;
- h. Penerapan pengendalian OPT ramah lingkungan masih belum merata diterapkan oleh petani di seluruh wilayah Indonesia. Sehingga penggunaan pengendali OPT seperti pestisida kimiawi masih cukup tinggi. Namun disamping itu, petani sudah mau diedukasi untuk menggunakan pengendali OPT ramah lingkungan seperti likat kuning dan tanaman refugia serta beberapa sudah membuat sendiri pestisida nabati.

## 2) Bawang Merah

- a. Terbatasnya pengembangan bawang merah *off season*.
- b. Harga benih bermutu relatif mahal.
- c. Penguasaan teknologi dalam penerapan budidaya menggunakan benih biji atau *True Shallot Seed* (TSS) masih terbatas.
- d. Penggunaan pestisida yang terlalu tinggi mengakibatkan terjadinya kerusakan sifat fisik dan kimia tanah, disamping itu tingkat pencemaran lingkungan dan residu pestisida tinggi. Penggunaan sarana pengendali organisme pengganggu tanaman (OPT) ramah lingkungan belum optimal.
- e. Faktor iklim yang ekstrim (kemarau panjang dan banjir) menyebabkan kegagalan tanam.

### 3) Sayuran Lainnya

- a. Sentra masih terkonsentrasi di beberapa pulau untuk memenuhi kebutuhan nasional. Pelaku usaha budidaya tanaman sayuran masih didominasi oleh petani di pulau Jawa. Pengetahuan dan keterampilan pelaku usaha budidaya tanaman sayuran di luar pulau Jawa masih terbatas.
- b. Terbatasnya ketersediaan benih bawang putih sehingga realisasi pertanaman tidak sesuai dengan target yang ditentukan.
- c. Petani belum mampu secara maksimal menerapkan teknologi budidaya yang adaptif terhadap anomali iklim, baik saat musim kemarau maupun saat musim hujan, sehingga beberapa produk tanaman sayuran berkurang produksinya saat musim hujan namun saat musim kemarau terjadi over produksi.
- d. Belum ada kegiatan khusus untuk pengembangan Kawasan Sayuran Daun dan Jamur sehingga yang dapat dilakukan adalah pelayanan minimal berupa pembinaan dan monitoring.

### 4) Tanaman Obat

- a. Pelaku usaha belum optimal dalam menerapkan GAP
- b. Penanaman tanaman obat untuk rimpang pada umumnya dilakukan diawal musim hujan, sehingga panen hanya pada bulan tertentu yang berakibat produk tidak tersedia merata sepanjang tahun.
- c. Tanaman obat belum menjadi usaha utama dalam usahatani karena secara ekonomis belum menguntungkan. Disamping itu, usaha tani komoditas ini memiliki umur panennya lama sehingga optimalisasi lahan dilakukan dengan melakukan pola tumpang sari dengan komoditas lainnya
- d. Jaminan harga baik di tingkat petani ataupun konsumen belum pasti yang berdampak pada pendapatan petani.
- e. Progam dan kegiatan mendukung hilirisasi dianggap belum menjanjikan bagi petani sehingga petani masih berorientasi pada aspek hulu, bukan nilai tambah.

## **B. Aspek Manajemen**

- a. Adanya proses revisi POK/ROK beberapa kegiatan untuk disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing, sehingga pelaksanaan kegiatan menjadi terlambat.
- b. Adanya pergantian Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada beberapa provinsi/kabupaten/kota yang

mendapatkan tugas pembantuan dari pusat, sehingga berimplikasi pada tertundanya pelaksanaan kegiatan dan proses penyerapan anggaran.

- c. Penjadwalan pengadaan sarana produksi sayuran dan tanaman obat melalui ULP di beberapa daerah sering tidak menjadi prioritas. Hal ini dapat menyebabkan realisasi kegiatan terlambat atau tidak dapat direalisasikannya kegiatan karena musim tanam sudah lewat. Petani tidak berani mengambil resiko gagal panen akibat penanaman di luar musim.
- d. Terjadinya gagal lelang yang disebabkan tidak adanya penawar karena Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dinilai terlalu tinggi, terbatasnya barang yang memenuhi persyaratan.
- e. Keterbatasan jumlah SDM kesatkeran, teknis, lapang dan monev.
- f. Koordinasi antara Dinas Pertanian Provinsi dan Dinas Pertanian Kabupaten dalam pelaksanaan TP provinsi belum berjalan sinergis.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat telah melakukan berbagai upaya tindak lanjut sebagai berikut:

1. Pengembangan Kawasan sayuran dan tanaman obat di luar sentra eksisting.
2. Mendorong budidaya ramah lingkungan.
3. Mendorong satker dinas supaya aktif melakukan koordinasi dengan ULP terkait jadwal dan proses pengadaan.
4. Menyusun perencanaan yang baik dalam pelaksanaan pengembangan kawasan sayuran dan tanaman obat untuk mengurangi permasalahan yang terjadi baik secara teknis maupun administratif. Beberapa langkah perencanaan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut :
  - Melakukan penyiapan KAK dan spesifikasi teknis segera setelah CPCL ditetapkan.
  - Melakukan pengajuan proses lelang pada akhir triwulan IV tahun sebelumnya setelah pagu tetap diterima.
  - Mempercepat penetapan pejabat pengelola Satker (PPK, bendahara, penguji SPM dan lain-lain).
  - Melakukan koordinasi dengan penangkar benih setelah CPCL ditetapkan.
  - Melakukan identifikasi CPCL pada akhir tahun 2018 untuk CPCL tahun 2019.
  - Mempercepat pengadaan yang tidak melalui proses lelang dan proses penyelesaian SPJ.

5. Berkoordinasi dengan instansi perbenihan dalam hal penyediaan benih untuk mendukung pengembangan sayuran dan tanaman obat tahun 2019.
6. Meningkatkan kompetensi SDM melalui pembinaan, penyuluhan, pelatihan, sosialisasi, apresiasi, bimbingan teknologi dan pelatihan manajemen baik di tingkat pusat maupun di daerah bekerjasama dengan instansi terkait.
7. Membantu petugas dan petani dalam mendapatkan akses inovasi teknologi tepat guna dalam mengantisipasi kondisi iklim (kelebihan hujan dan kekeringan).

### 3.2. Capaian Kegiatan Direktorat Buah dan Florikultura

Pengukuran capaian kinerja atas kegiatan Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura yang telah difasilitasi melalui dukungan dana APBN pada Tahun 2019 dilakukan dengan membandingkan target kinerja yang telah ditetapkan dengan pencapaian realisasi target tersebut.

Tabel 7. Realisasi Target Kegiatan Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura Tahun 2019

Sasaran Strategis	Output	Target	Realisasi	Persentase (%)
Terpenuhinya kebutuhan tanaman buah dan florikultura untuk komoditas ekspor dan pengendali impor	1. Kawasan Jeruk (ha)	3.250	3.175	97,69
	2. Kawasan Mangga (ha)	1.800	1.800	100
	3. Kawasan Manggis (ha)	1.560	1.560	100
	4. Kawasan Pisang (ha)	1.500	1.475	98,33
	5. Kawasan Buah Lainnya (ha)	801	799	99,75
	6. Kawasan Buah di Wilayah Perbatasan (ha)	500	500	100
	7. Kawasan Tanaman Florikultura (m <sup>2</sup> )	12.000	12.000	100
	8.Registrasi kebun buah (kebun)	900	923	102,56
	9.Penerapan GAP (kelompok)	25	25	100
	10.Fasilitasi Teknis Dukungan Produksi Buah dan Florikultura (bulan)	12	12	100

Sumber : Direktorat Buah dan Florikultura, 2020

Kegiatan pengembangan kawasan buah dan florikultura umumnya berhasil dilaksanakan, akan tetapi ada di beberapa daerah yang tidak terealisasi atau dilaksanakan namun tidak dapat mencapai target output. Berikut daftar lokasi dan permasalahan yang menyebabkan belum tercapainya target dalam pengembangan kawasan Buah :

Tabel 8. Daftar Lokasi dan Permasalahan Belum Tercapainya Target Pengembangan Kawasan Buah dan Florikultura

No	Kabupaten	Permasalahan yang Dihadapi	Tindak Lanjut
1	Wonosobo Komoditas Pisang Target 25 ha Realisasi )	Terjadinya gagal lelang untuk pengadaan bantuan benih dan saprodi pisang karena tidak ada calon penyedia yang memenuhi syarat, dan sudah tidak memungkinkan lagi dilakukan lelang ulang karena padatnya volume pekerjaan di ULP pada akhir tahun.	Membuat surat kepada KPA (Kepala Dinas Pertanian) kepada PPK (Kabid Hortikultura Wonosobo)
2	Rejang Lebong Komoditas Jeruk Target 70 ha Realisasi 20 ha (28,57%)	Terjadi gagal lelang biasa 2 kali dan gagal lelang cepat dua kali	Dinas Provinsi Bengkulu telah Membuat surat justifikasi ke Ditjen Hortikultura terkait tidak terlaksananya pengembangan kawasan jeruk seluas 50 Ha di Kab. Rejang Lebong dan 25 Ha di Kab. Lebong.
3	Lebong Komoditas jeruk Target 75 ha Realisasi 50 ha (66,67%)	Terjadi gagal lelang biasa 2 kali dan gagal lelang cepat dua kali	

Beberapa permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan kawasan buah dan florikultura antara lain :

1. Pengembangan produksi benih buah bersertifikat belum dikawal secara baik, sehingga sering terjadi kekurangan benih dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan kawasan, seperti salak, pisang dan duku.
2. Belum terjadi koordinasi yang baik antara penangkar, BPSB dan pihak yang akan menggunakan benih, terkait mapping kebutuhan benih dengan jaminan akan diserap pada satu tahun kedepan, sehingga setahun

sebelumnya penangkar sudah mulai menyiapkan benihnya dan proses sertifikasi oleh BPSB. Terjadinya alih fungsi lahan dari pertanian ke sarana publik yang menyebabkan terjadinya pengurangan luas pengembangan kawasan buah dan florikultura.

3. Terjadinya bencana di beberapa wilayah seperti angin puting beliung, longsor, erupsi dan gempa bumi terutama yang merusak kawasan buah dan florikultura, mengakibatkan penurunan produksi.

Upaya tindak lanjut lainnya dalam mengatasi permasalahan teknis maupun administratif dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan produksi buah dan florikultura , antara lain :

1. Melakukan koordinasi yang lebih baik dan intensif dengan pihak terkait khususnya dalam penyediaan benih buah bersertifikat, seperti para penangkar/produsen benih dan lembaga sertifikasi benih, sehingga ada jaminan ketersediaan benih bersertifikat secara tepat waktu, mutu dan jumlah.
2. Meningkatkan koordinasi dengan ULP untuk mempercepat proses pengadaan.
3. Menyusun perencanaan yang baik dalam pelaksanaan pengembangan kawasan buah untuk mengurangi permasalahan yang terjadi baik secara teknis maupun administratif. Beberapa langkah perencanaan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut :
  - a. Melakukan penyiapan KAK spesifikasi teknis segera setelah CPCL.
  - b. Mempercepat penetapan pejabat pengelola Satker (PPK, bendahara, penguji SPM dan lain-lain).
  - c. Melakukan koordinasi dengan penangkar benih dan BPSB setahun sebelum pelaksanaan kegiatan pengembangan buah, untuk melakukan mapping bersama kebutuhan benihnya.
  - d. Melakukan identifikasi CPCL pada akhir tahun 2019 untuk CPCL tahun 2020.
  - e. Mempercepat pengadaan yang belum lelang dan proses penyelesaian SPJ.
4. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan penangkar benih untuk menghasilkan benih bermutu sesuai spesifikasi yang ditetapkan.
5. Melakukan pembinaan/pendampingan penerapan teknologi budidaya yang baik dan benar (*Good Agricultural Practices/ GAP*), dan sosialisasi serta pembinaan secara intensif dalam registrasi kebun buah/lahan usaha pada lokasi pengembangan kawasan buah dan florikultura.

6. Mempercepat pelaksanaan registrasi kebun/lahan usaha pada tanaman buah dan florikultura, terutama yang memiliki potensi ekspor cukup besar.
7. Melakukan percepatan dalam pengiriman Pedoman Teknis Pengembangan Kawasan Buah dan Florikultura lebih cepat sehingga mempercepat pelaksanaan.
8. Menjalin koordinasi dengan instansi terkait, baik secara vertikal maupun horisontal, seperti Dinas Pertanian Provinsi; Dinas Pertanian Kab/Kota, Seluruh eselon I lingkup Kementerian Pertanian, Lembaga Penelitian, Perguruan tinggi, Lembaga dan Kementerian terkait lainnya, agar dapat berkolaborasi dalam upaya peningkatan produksi dan daya saing produk buah dan florikultura nasional.
9. Melakukan sosialisasi intensif kepada petani/kelompok tani/gapoktan/asosiasi melalui pembinaan dan pendampingan intensif.
10. Meningkatkan kompetensi SDM melalui pembinaan, penyuluhan, pelatihan, sosialisasi, apresiasi, bimbingan teknologi dan pelatihan manajemen baik di tingkat pusat maupun di daerah.
11. Menyediakan teknologi tepat guna dalam mengantisipasi kondisi iklim (kelebihan hujan dan kekeringan).
12. Meningkatkan produksi buah yang berkualitas dan berdaya saing untuk meningkatkan ekspor dan sebagai substitusi impor.

### 3.3. Capaian Kegiatan Direktorat Perbenihan Hortikultura

Capaian kinerja Direktorat Perbenihan Hortikultura tahun 2019 diukur dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja. Secara rinci, realisasi pencapaian target penetapan kinerja tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 9 berikut :

Tabel 9. Realisasai Kegiatan Pengembangan Perbenihan Hotikultura Tahun 2019

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Terpenuhinya kebutuhan perbenihan cabai dan bawang merah	1. Jumlah benih cabai yang tersedia (batang)	400.000	390.000	97,50
		2. Jumlah benih bawang merah yang tersedia (kg)	800.000	793.000	99,13
2.	Terpenuhinya kebutuhan	1. Jumlah benih mangga yang tersedia (batang)	410.500	400.500	97,56

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
	perbenihan hortikultura untuk komoditas ekspor dan pengendali impor	2. Jumlah benih manggis yang tersedia (batang)	290.000	245.362	84,61
		3. Jumlah benih pisang yang tersedia (batang)	199.500	159.500	79,95
		4. Jumlah benih durian yang tersedia (batang)	194.000	174.500	89,69
		5. Jumlah benih lengkeng yang tersedia (batang)	381.000	381.000	100,00
		6. Jumlah benih jeruk yang tersedia (batang)	692.000	689.500	99,64
		7. Jumlah benih bawang putih yang tersedia (kg)	100.000	95.000	95,00
		8. Jumlah sarana prasarana yang tersedia (unit)	27	27	100,00
		3	Indikator kinerja lainnya	1. Sertifikasi benih hortikultura (unit)	1.400
2. Fasilitasi teknis dukungan perbenihan hortikultura (bulan)	12			12	100,00

Sumber : Direktorat Perbenihan Hortikultura, 2020

Sejumlah masalah diidentifikasi sebagai faktor tidak optimumnya pencapaian output fisik dan keuangan dari kinerja kegiatan pengembangan sistem perbenihan hortikultura tahun 2019. Adapun masalah yang ditemui adalah sebagai berikut:

1. Adanya perubahan dalam pelaksanaan program/kebijakan yang ditindaklanjuti dengan adanya *recofusing* anggaran dan target output di pertengahan tahun mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan kegiatan serta menjadi faktor munculnya *miss* koordinasi/komunikasi di internal pengelola satker di beberapa daerah sehingga proses CPCL, pengadaan hingga distribusi benih menjadi terhambat atau bahkan tidak terlaksana seperti kegiatan perbenihan di Jawa Tengah, Jawa Timur dan lain-lain;
2. Masih adanya sejumlah regulasi di bidang perbenihan hortikultura yang secara langsung maupun tidak langsung menyebabkan secara teknis pencapaian target output kegiatan menjadi sulit tercapai, seperti aturan



terkait persyaratan teknis minimal benih untuk pengadaan;

3. Masih ditemukan pelaksana kegiatan perbenihan hortikultura termasuk petugas pengadaan benih, Pengawas Benih Tanaman dan Pejabat Pembuat Komitmen di daerah yang belum mengetahui dan memahami Peraturan Perbenihan Hortikultura sehingga menyebabkan timbulnya kesulitan/kendala dalam pelaksanaan kegiatan;
4. Terbatasnya atau tidak adanya ketersediaan benih bermutu yang sesuai dengan varietas dan jumlah sesuai kebutuhan pada saat CPCL di daerah. Selain itu, waktu ketersediaan benih dan harga benih sering tidak sesuai pada saat pengadaan benih. Di beberapa tempat, harga benih di produsen benih lebih besar dari *unit cost* yang ada di DIPA/POK sehingga benih menjadi tidak terbeli.
5. Di beberapa tempat, pelaksana kegiatan kurang mempertimbangkan waktu pelaksanaan secara tepat sehingga waktu pelaksanaan kegiatan menjadi sangat mepet dan tidak mencukupi waktunya untuk dilaksanakan.
6. Bervariasinya harga benih di produsen benih menjadikan pelaksana kegiatan penyediaan benih sulit memperhitungkan secara tepat harga benih yang akan digunakan sebagai HPS. Hal ini menyebabkan pada saat pengadaan terjadi kelebihan pagu. Sisa ini menyebabkan serapan keuangan menjadi lebih rendah sedangkan realisasi fisik besar.
7. Keterbatasan keterampilan SDM di UPT-UPT perbenihan di daerah serta sarana produksi/prosesing hingga fasilitas penyimpanan benih menjadi pertimbangan bagi pelaksana kegiatan perbenihan di daerah melaksanakan output-output kegiatan perbenihan, terutama untuk daerah pengembangan kawasan baru.

Beberapa upaya tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Direktorat Perbenihan Hortikultura di Tahun 2019, antara lain sebagai berikut :

1. Pemantapan komitmen dan pernyataan mengenai kesanggupan daerah untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana yang telah dialokasikan dalam DIPA/POK. Disini sangat diperlukan keseriusan satker-satker daerah dalam melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan dalam DIPA/POK.
2. Pembinaan teknis yang intensif kepada pemangku kepentingan perbenihan (petugas BPSB, petugas BBH, pelaku usaha produksi benih, pelaku usaha pemasukan dan pengeluaran benih, pengedar benih) baik secara langsung maupun tidak langsung terkait Peraturan Perbenihan Hortikultura sesuai dengan kebutuhannya, yaitu bidang pendaftaran varietas, uji keunggulan varietas uji kebenaran varietas, sertifikasi benih hortikultura, pengawasan peredaran benih hortikultura maupun pemasukan dan pengeluaran benih hortikultura; dll.

3. Identifikasi ketersediaan benih di sentra - sentra produsen benih perlu dilakukan untuk dapat memenuhi kebutuhan benih di kegiatan pusat maupun kawasan hortikultura.
4. Apresiasi teknologi produksi benih hortikultura akan dilaksanakan dengan mengundang produsen benih sebagai upaya pemantapan dan penumbuhan penangkar benih di daerah sentra maupun pengembangan.
5. Memfasilitasi sarana prasarana seperti bangunan gudang benih, screen house, sarana irigasi, alat dan mesin pertanian di BBH provinsi dan produsen benih sebagai upaya peningkatan kapasitas produksi.
6. Pembinaan kepada produsen benih akan dilakukan secara intensif sehingga produsen benih mampu meningkatkan kompetensinya.
7. Melakukan penyederhanaan/revisi terhadap regulasi yang mendukung realisasi program/kegiatan.

### 3.4. Capaian Kegiatan Direktorat Perlindungan Hortikultura

Pencapaian kinerja perlindungan hortikultura dilakukan dengan mengukur target yang telah ditetapkan dibandingkan dengan realisasi. Secara rinci realisasi pencapaian target kegiatan Pengembangan Perlindungan Hortikultura Tahun 2019 disajikan pada Tabel 10.

Tabel 10. Realisasi Kegiatan Direktorat Perlindungan Hortikultura Tahun 2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Pengamanan produksi hortikultura dari serangan OPT terhadap luas tanam sebesar 95 %	Pengendalian OPT Cabai dan Bawang Merah (Ha)	900	888	98,67
	Gerakan Pengendalian OPT Hortikultura Lainnya (Ha)	260	256	98,46
	Desa Pertanian Organik (desa)	250	250	100,00
	Penerapan PHT (kelompok)	22	21	95,45
	Dampak Perubahan Iklim dan Bencana Alam (Ha)	770	754	97,92

\*) data per tanggal 28 Januari 2020 berdasarkan konfirmasi ke daerah

Sumber : Direktorat Perlindungan Hortikultura, 2020

Pencapaian yang telah dihasilkan pada masing masing sasaran output kegiatan, telah memberikan dampak dan manfaat yang cukup signifikan dalam

mendukung pengamanan produksi melalui pengembangan Kawasan hortikultura 2019. Dukungan subsistem yang menjadi satu kesatuan pendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan, merupakan sebuah keniscayaan dalam menghantarkan pencapaian sasaran. Namun demikian masih dijumpai beberapa permasalahan, hambatan dan tantangan, baik dari aspek teknis maupun aspek manajemen. Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Terbatasnya SDM POPT yang berakibat pada tidak intensifnya pengamatan OPT dan bimbingan teknis ditingkat lapang, serta keterlambatan laporan OPT;
2. Terbatasnya sarana prasarana penunjang pelaksanaan kegiatan pengamatan OPT dan DPI, pengembangan agens hayati dan biopestisida, serta sarana prasarana pendukung operasional laboratorium lainnya;
3. Belum tersedianya sistem pelaporan OPT hortikultura dan DPI yang terintegrasi;
4. Belum tersedianya sistem peringatan dini/*Early Warning System* (EWS) dalam rangka pengamanan produksi hortikultura dari serangan OPT dan DPI;
5. Rendahnya capaian serapan anggaran kegiatan perlindungan hortikultura tersebut antara lain disebabkan keterlambatan administrasi pada proses pencairan dana sesuai kebutuhan, setelah satker berada di dinas pertanian, penetapan PPK dan perangkatnya memerlukan waktu lebih lama, dan adanya kegiatan lapang menyesuaikan dengan kondisi iklim;
6. Fasilitasi Bantuan untuk Pengembangan Kawasan yang menggunakan sistem lelang capaian realisasi fisik masih terkendala beberapa hal misalnya menunggu waktu musim yang tepat dan masalah lainnya;
7. Pengembangan sistem perlindungan OPT hortikultura pada UPTD BPTPH masih belum didukung sarana laboratorium dan fasilitas klinik PHT yang memadai, sehingga pengamanan produksi hortikultura dari serangan OPT belum tercapai maksimal;
8. Kemampuan SDM pengelola Satker belum memadai terutama pada daerah yang mendapatkan alokasi dana cukup besar dan adanya alih tugas tenaga yang belum terlatih, menyebabkan kegiatan pembangunan hortikultura tidak dapat berjalan maksimal bahkan tidak berjalan optimal;
9. Masih adanya pengelola Satker dan atau pelaksana kegiatan yang belum mencermati POK, Pedum dan Juklak secara cermat. Sehingga masih terdapat kegiatan yang tidak megacu pada aturan dan atau ketentuan

yang berlaku;

10. Kurangnya koordinasi antara petugas/pelaksana kegiatan di daerah dengan petugas/pelaksana di pusat, sehingga capaian target pelaksanaan kegiatan belum optimal. Masih adanya beberapa Satker yang belum melaporkan capaian output fisik, sehingga capaian realisasi fisik tidak sesuai dengan capaian realisasi keuangan;
11. Kelembagaan petani pada umumnya masih lemah dan adopsi teknologi maju masih rendah. Laporan BTPH yang disampaikan belum menggambarkan potret realisasi 5 kegiatan IKU perlindungan hortikultura, tetapi umumnya melaporkan realisasi kegiatan gerakan pengendalian OPT cabai dan bawang merah, pengendalian OPT Hortikultura Lainnya, Penerapan PHT, Desa Pertanian Organik, dan penanganan dampak perubahan iklim dan bencana alam. Akibatnya, menyulitkan untuk mengetahui kendala teknis masing-masing kegiatan yang terjadi di lapangan, sehingga solusi konkrit yang diberikan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan ke depan kurang efektif;
12. Sumber Daya Manusia (SDM) terbatas, luas lahan pertanian semakin berkurang/menyempit, dan penggabungan Satuan Kerja menyebabkan masih terdapat beberapa wilayah kerja POPT (kecamatan) yang kosong sehingga pengawalan tanaman hortikultura masih lemah dan berakibat pengawasan dan laporan OPT hortikultura kurang tertangani, dan sasaran (obyek) komoditas tanaman yang dikawal oleh seorang POPT terlalu banyak (pangan dan hortikultura) yang berakibat pada kurang intensifnya pengamatan OPT;
13. Masih rendahnya tingkat pemahaman dan pengetahuan petani terhadap identifikasi OPT, penggunaan bahan kimia masih merupakan alternatif pertama dalam sistem pengelolaan OPT hortikultura oleh petani, bahan pengendalian OPT Hortikultura belum tersedia pada tingkat lapang yang bersifat ramah lingkungan (Agens Hayati ataupun biopestisida);
14. Untuk mendukung kegiatan teknis perlindungan, umumnya di daerah antara lain kekurangan SDM baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya dan sarana prasarana yang tersedia terbatas, sehingga cukup menyulitkan para petugas POPT – PHP dalam mengcover wilayah kerja yang umumnya lebih dari 2 kecamatan untuk melaksanakan tupoksinya. Minimnya sarana untuk menunjang pelaksanaan kegiatan POPT antara lain, buku pedoman perlindungan bergambar, alat pengolah data, identifikasi OPT, komputer SIM dan perekam data cuaca/iklim. Sedangkan prasarana yang belum memadai antara lain ruangan lab untuk pengembangan agens hayati dan biopestisida, serta dukungan pemerintah dan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan UU No. 13

Tahun 2010 tentang Hortikultura, antara lain gerakan pengelolaan OPT dan DPI yang ramah lingkungan;

15. Belum adanya sistem pelaporan yang terintegrasi dalam rangka pelaksanaan pelaporan OPT hortikultura sehingga dalam pengolahan data membutuhkan rentang waktu yang panjang;
16. Bahan starter agens hayati yang diperlukan untuk pengembangan agens hayati masih relatif sulit untuk diperoleh, SDM dalam hal ini petani yang belum sepenuhnya terampil dalam perbanyakan agens hayati, sarana untuk pengembangan agens hayati di tingkat kelompok tani kurang memadai, dan tidak semua petugas POPT dilapangan handal dalam teknik pengembangan agens hayati di tingkat lapangan, serta belum tersedianya payung hukum untuk menjamin pengembangan biopestisida; dan
17. Untuk mengamankan produksi hortikultura dari serangan OPT dan menghadapi perubahan iklim antara lain perlu digalakkan kembali sistem peringatan dini/bahaya dan sistem pelaporan perlindungan hortikultura yang baik.

Sedangkan tindak lanjut yang telah dilakukan adalah sebagai berikut

1. Peningkatan kemampuan SDM pelaku perlindungan hortikultura dalam pengelolaan OPT hortikultura melalui pelatihan/magang;
2. Optimalisasi dan fasilitasi sarana prasarana penunjang pelaksanaan kegiatan pengamatan OPT dan DPI, pengembangan agens hayati dan biopestisida, serta sarana prasarana pendukung operasional laboratorium;
3. Menyediakan Sistem Informasi Manajemen (SIM) OPT hortikultura dan DPI yang terintegrasi;
4. Menyediakan sistem peringatan dini/EWS dalam rangka pengamanan produksi hortikultura dari serangan OPT dan DPI;
5. Meningkatkan koordinasi dengan Satker Diperta provinsi supaya realisasi capaian kegiatan perlindungan baik keuangan maupun fisik menjadi lebih baik dibandingkan sebelumnya;
6. Laporan evaluasi perlindungan yang disampaikan sebaiknya dapat menggambarkan realisasi 5 IKU perlindungan, atau minimal menyajikan secara ringkas dalam bentuk matrik dan permasalahan serta progres penyelesaiannya dijelaskan secara lisan, sehingga kendala yang timbul di lapangan dapat dicarikan solusi penanganan yang lebih efektif guna meningkatkan capaian kegiatan pada tahun mendatang;
7. Perubahan pola serangan OPT hortikultura dari musiman menjadi merata

sepanjang tahun, kiranya menjadi bahan rekapan data series (minimal 5 musim/tahun) di daerah karena dengan mengetahui hubungan unsur iklim dengan perkembangan OPT, menjadi bahan rekomendasi dalam kegiatan DPI. Untuk mengurangi emisi GRK (gas Rumah Kaca) pada hortikultura, diperlukan demplot - demplot budidaya sesuai GAP yang mampu menurunkan emisi GRK baik pada hortikultura semusim maupun tanaman tahunan;

8. Pengadaan alat dan bahan untuk kegiatan perlindungan dalam rangka kesejahteraan petani, diperlukan perencanaan dan koordinasi yang baik antara satker, ULP dan tim teknis kegiatan, sehingga *output* yang dihasilkan tersedianya sarana perlindungan sesuai rencana, efektif, efisien, ekonomis dan tertib aturan (3 E + 1 T);
9. Upaya pemecahan masalah dalam kegiatan perlindungan hortikultura tahun 2019 yaitu meningkatkan Klinik tanaman/PPAH, dan gerakan pengendalian OPT hortikultura ramah lingkungan oleh kelompok tani, sehingga mendorong penumbuhan keyakinan kepada petani terhadap upaya alternatif pengendalian yang berwawasan/ramah lingkungan, yang apabila dilaksanakan dengan baik dan benar mampu menekan serangan OPT dan meningkatkan kualitas hasil;
10. Melakukan forum koordinasi pada tingkat lapang terhadap pengenalan dan perbanyakan dan pemanfaatan Agens Hayati dan Biopestisida pada petani dan petugas lapang. Memberikan bimbingan dan pembinaan serta peningkatan kemampuan/ketrampilan petani dan petugas dalam upaya pengelolaan OPT berdasarkan sistem PHT, perlu ditingkatkan THL POPT perlu dimaksimalkan dan diusulkan menjadi PNS;
11. Menyusun regulasi tentang pendaftaran, produksi, standar mutu dan peredaran pestisida biologi;
12. Melakukan pencermatan pada Pedoman Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan kegiatan agar pelaksanaan kegiatan berjalan dengan benar dan sesuai aturan. Disamping itu pencermatan POK perlu dilakukan agar jika terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan rencana semula dapat segera dilakukan ralat dan atau revisi POK;
13. Identifikasi CP/CL agar dapat dilakukan di tahun sebelumnya, proses lelang dapat dilakukan di awal tahun, sehingga pelaksanaan kegiatan tanam juga dapat dilakukan pada musim tanam di awal tahun;
14. Berkoordinasi secara intensif antara Pusat, Provinsidan Kabupaten dalam rangka mempercepat pelaksanaan kegiatan strategis; dan

15. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM POPT dan sarana pengamatan OPT dan iklim serta gerakan pengelolaan OPT Hortikultura ramah lingkungan dengan optimalisasi pelaksanaan Klinik PHT, dan pengembangan agens hayati pada masing-masing lokasi kawasan pengembangan hortikultura dan peningkatan kualitas laboratorium pengamatan hama penyakit serta laboratorium pestisida pada wilayah tertentu.

### 3.5. Capaian Kegiatan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura

Capaian kinerja kegiatan kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Tahun 2019 diukur dengan membandingkan capaian realisasi dengan target yang telah ditentukan.

Tabel 10. Realisasi kegiatan Pengolahan dan emasaran Hasil Hortikultura

No	Output	Target	Realisasi	%
1	Pengembangan Mutu dan Standardisasi	162 Unit	167 unit	103
2	GHP Hortikultura	85 Kelompok	84 kelompok	98
3	Fasilitas Pascapanen dan Pengolahan Cabai dan Bawang Merah	237 Unit	237 unit	100
4	Fasilitas Teknis Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura	12 bulan	12	100
5	Fasilitas Pascapanen dan Pengolahan Hortikultura Lainnya	167 Unit	165	98
6	Pemasaran Produk Hortikultura	235 Unit	233	99

Sumber : Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura, 2020

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, pencapaian kinerja Direktorat PPHH dapat dikatakan Berhasil. Hal ini dikarenakan adanya komitmen dan upaya keras dari Direktorat PPHH yang dilakukan melalui sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan dan *stakeholders* untuk mewujudkan tercapainya kemajuan dan peningkatan kinerja pembangunan hortikultura

Keberhasilan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura banyak ditentukan oleh peran institusi lain di luar Direktorat PPHH. Untuk perbaikan

pencapaian kinerja Direktorat PPHH kedepan, maka perlu dilakukan beberapa upaya tindak lanjut antara lain:

1. Penerapan SPI secara optimal;
2. Pencermatan pedoman, juklak dan POK agar kegiatan berjalan sesuai dengan rencana;
3. Penyempurnaan dokumen - dokumen, pengawalan dan pembinaan pelaksanaan pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura untuk pencapaian target output fisik di lapangan;
4. Pelaksanaan identifikasi CPCL di tahun sebelumnya, proses lelang dapat dilakukan di awal tahun, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan pada awal tahun;
5. Peningkatan kualitas SDM pengelola kegiatan hortikultura di pusat dan daerah, dan
6. Koordinasi secara intensif antara pelaksana kegiatan di pusat dan daerah.



### III. PENGELOLAAN ANGGARAN DAN SUMBERDAYA MANUSIA

#### 4.1. Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura

Realisasi anggaran Ditjen Hortikultura sampai dengan tanggal 28 Januari 2020 sebesar Rp944.676.148.736,- (90,83%) dari pagu anggaran sebesar Rp1.040.063.787.000,-. Realisasi tersebut berasal dari enam kegiatan utama yang berasal dari satker pusat dan daerah. Rincian realisasi enam kegiatan utama Ditjen Hortikultura dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 11. Realisasi Kegiatan Utama Ditjen Hortikultura Tahun 2019

No	Kegiatan	Pagu (Rp 000,-)	Realisasi (Rp 000,-)	%
1.	Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat	577.688.932	510.834.189	88,43
2.	Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura	71.793.950	65.226.576	0,85
3.	Pengembangan Sistem Perlindungan Hortikultura	46.406.163	44.718.621	96,36
4.	Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura	148.799.270	140.087.211	94,15
5.	Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura	115.388.251	108.220.818	93,79
6.	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura	79.987.221	75.588.732	94,50
<b>Ditjen Hortikultura</b>		<b>1.040.063.787</b>	<b>944.676.149</b>	<b>90,83</b>

Sumber : Aplikasi Simonev dan OmSPAN Kementerian Keuangan, 2019

Tabel di atas menunjukkan bahwa kegiatan utama yang paling tinggi realisasi anggarannya adalah Pengembangan Sistem Perlindungan Hortikultura sebesar Rp44.718.621.310 atau 96,36%. Sementara, kegiatan yang paling rendah realisasi anggarannya adalah Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat sebesar Rp510.834.189.634,- atau 88,43%. Kegiatan utama tersebut didukung oleh output-output berikut:

- 1) Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat meliputi: pengembangan kawasan bawang merah, kawasan aneka cabai, kawasan sayuran lainnya, kawasan sayuran dan tanaman obat di wilayah perbatasan, kawasan tanaman obat dan GAP sayuran dan tanaman obat.
- 2) Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura meliputi: benih cabai, bawang merah, mangga, manggis, pisang, durian, lengkeng, jeruk,

bawang putih, jumlah sarana dan prasarana, sertifikasi benih dan fasilitas teknis dukungan perbenihan hortikultura.

- 3) Pengembangan Sistem Perlindungan Hortikultura meliputi: pengendalian OPT cabai dan bawang merah, pengendalian OPT hortikultura lainnya, desa pertanian organik, penerapan pengendalian hama terpadu, penanganan dampak perubahan iklim dan bencana alam, dan fasilitas teknis dukungan perlindungan hortikultura.
- 4) Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura meliputi: terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Hortikultura, terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel di lingkungan Direktorat Jenderal Hortikultura, dan meningkatnya kualitas layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura.
- 5) Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura meliputi: Pengembangan kawasan jeruk, kawasan mangga, kawasan manggis, kawasan pisang, kawasan buah lainnya, kawasan buah wilayah perbatasan, kawasan florikultura, penerapan GAP buah dan florikultura, registrasi kebun buah dan lahan usaha florikultura, dan fasilitas teknis dukungan produksi buah dan florikultura.
- 6) Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura meliputi: pengembangan mutu dan standardisasi, GHP Hortikultura, fasilitas pasca panen dan pengolahan cabai dan bawang merah, fasilitas pasca panen dan pengolahan hortikultura lainnya dan fasilitas teknis dukungan pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura.

Bila dilihat per kewenangan, maka rincian pagu anggaran dan realisasi keuangan tahun 2019 seperti pada tabel berikut.

Tabel 6 Realisasi per Kewenangan Pusat dan Daerah Tahun 2019

No.	Kewenangan	Pagu (Rp 000,-)	Realisasi (Rp 000,-)	%
I.	Pusat	150.699.897	140.150.408	93,00
II.	Daerah	889.363.890	804.525.740	90,46
	Dekonsentrasi (DK)	136.912.270	129.944.618	94,91
	Tugas Pembantuan (TP)	752.451.620	674.581.122	89,65
	<b>Total</b>	<b>1.040.063.787</b>	<b>944.676.148</b>	<b>90,83</b>

Sumber : Aplikasi Simonev dan OmSPAN Kementerian Keuangan, 2020

Tabel tersebut menunjukkan bahwa alokasi anggaran terbesar terdapat pada Tugas Pembantuan yaitu sebesar Rp752.451.620.000,- sedangkan alokasi anggaran terkecil berada di Dekonsentrasi sebesar Rp136.912.270.000,-. Sementara Pusat sebesar Rp150.699.897.000,-. Tingginya dana Tugas Pembantuan (TP) dikarenakan banyaknya satker yang dianggarkan yaitu sebanyak 86 satker terdiri dari 1 satker pusat, 34 satker Dekonsentrasi, dan 33 satker TP Provinsi dan 18 satker TP Mandiri.

#### 4.2. Sumber Daya Manusia Direktorat Jenderal Hortikultura

Sumber daya manusia di Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2019 sebanyak 351 orang dari berbagai tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan yang paling banyak adalah S1 sebanyak 161 orang, dan paling sedikit adalah D3, SLTP dan SD masing-masing sebanyak 6 orang. Rincian komposisi sumber daya manusia Direktorat Jenderal Hortikultura menurut tingkat pendidikan Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7. Komposisi Sumber Daya Manusia Direktorat Jenderal Hortikultura Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2019

NO	GOL/ RUANG	S3	S2	S1	D4	SM	D3	D2	D1	SLTA	SLTP	SD	JUMLAH
1	IV/e												0
2	IV/d		2										2
3	IV/c	2	1	1									4
4	IV/b	2	12	3									17
5	IV/a	1	28	5									34
6	III/d	2	25	42									69
7	III/c		25	54									79
8	III/b		2	23			3			26			54
9	III/a			33			2			16			51
10	II/d						1			15	4		20
11	II/c									10	2		12
12	II/b									2		2	4
13	II/a									1		4	5
14	I/d												0
15	I/c												0
16	I/b												0
17	I/a												0
<b>JUMLAH</b>		<b>7</b>	<b>95</b>	<b>161</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>351</b>

Sumber: Ditjen Hortikultura

Tabel di atas menunjukkan bahwa berdasarkan golongan/ruang maka Pegawai Negeri Sipil (PNS) Ditjen Hortikultura yang paling banyak adalah golongan III/c sebanyak 79 orang sedangkan yang paling sedikit adalah golongan IV/d sebanyak dua orang. Untuk golongan yang paling rendah yaitu II/a sebanyak lima orang.

## IV. PERMASALAHAN DAN UPAYA TINDAK LANJUT

### 5.1. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2019 adalah:

- 1) Adanya revisi POK/ROK beberapa kegiatan, pergantian KPA dan PPK, penjadwalan pengadaan melalui ULP di beberapa daerah tidak menjadi prioritas, adanya gagal lelang, terbatasnya jumlah SDM kesatkeran, teknis, lapang dan monev dan kurangnya sinergitas antara satker provinsi dan kabupaten/kota pelaksana TP provinsi;
- 2) Kurangnya koordinasi antara petugas/pelaksana kegiatan di daerah dengan petugas/pelaksana di pusat, sehingga beberapa kegiatan yang sulit dilaksanakan dan perlu direvisi menjadi tidak dilaporkan dan berdampak pada rendahnya capaian kegiatan;
- 3) Pengembangan kawasan sayuran dan tanaman obat serta buah dan florikultura masih terfokus pada daerah tertentu, berskala kecil dan konvensional, harga benih bermutu relatif mahal dan terbatas, adopsi teknologi budidaya masih terbatas, sosialisasi dan pembinaan dalam registrasi kebun/lahan usaha masih terbatas, dan pengendalian OPT ramah lingkungan spesifik lokasi masih terbatas;
- 4) Rantai pemasaran terlalu panjang sehingga ada distorsi harga yang tinggi antara produsen dan konsumen;
- 5) Terjadinya alih fungsi lahan, bencana alam dan *el-nino* di beberapa wilayah menyebabkan penurunan produksi dan luas panen;
- 6) Belum adanya koordinasi yang baik antara penangkar, BPSB dan pihak yang akan menggunakan benih, terkait *mapping* kebutuhan benih dengan jaminan akan diserap pada satu tahun kedepan, yang mana penangkar sudah mulai menyiapkan benihnya setahun sebelumnya dan proses sertifikasi oleh BPSB;
- 7) Masih ditemukan pelaksana kegiatan perbenihan hortikultura di daerah yang belum mengetahui dan memahami peraturan perbenihan hortikultura sehingga menyulitkan pelaksanaan kegiatan;
- 8) Terbatasnya sarana produksi/*processing* hingga fasilitas penyimpanan benih di UPT-UPT Perbenihan di daerah menjadi pertimbangan bagi pelaksana kegiatan perbenihan di daerah melaksanakan output-output kegiatan perbenihan, terutama untuk daerah pengembangan kawasan baru;

- 9) Terbatasnya sarana prasarana penunjang pelaksanaan kegiatan pengamatan OPT dan DPI, pengembangan agens hayati dan biopestisida, serta sarana prasarana pendukung operasional laboratorium lainnya;
- 10) Belum tersedianya sistem pelaporan OPT hortikultura dan DPI yang terintegrasi;
- 11) Belum tersedianya sistem peringatan dini/*Early Warning System* (EWS) dalam rangka pengamanan produksi hortikultura dari serangan OPT dan DPI;
- 12) Masih rendahnya tingkat pemahaman dan pengetahuan petani terhadap identifikasi OPT, penggunaan bahan kimia masih merupakan alternatif pertama dalam sistem pengelolaan OPT hortikultura oleh petani, bahan pengendalian OPT Hortikultura belum tersedia pada tingkat lapang yang bersifat ramah lingkungan (Agens Hayati ataupun biopestisida);
- 13) Belum optimalnya penerapan SPI;
- 14) Sering terlambatnya identifikasi CPCL;
- 15) *Reward and punishment* belum optimal serta inventarisasi dan penilaian aset belum sistematis;
- 16) Inventarisasi dan penilaian aset belum terlaksana secara sistematis; dan
- 17) Masih banyaknya petugas monev yang tidak tertib dan tidak tepat waktu dalam menginput laporan realisasi fisik pada aplikasi SMART (bulanan dan semesteran) maupun pelaporan e-Monev Bappenas.

## 5.2. Upaya Tindak Lanjut

Upaya dan tindak lanjut yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan adalah:

- 1) Menyusun perencanaan yang baik dan mendorong satker dinas pertanian provinsi/kabupaten/kota supaya aktif melakukan koordinasi dengan ULP terkait jadwal dan proses pengadaan agar tidak menumpuk di akhir tahun, memperbanyak pegawai yang melakukan pelatihan, uji kompetensi baik pengadaan maupun teknis dan kegiatan-kegiatan lain yang menambah keterampilan pegawainya;
- 2) Koordinasi yang intensif antara petugas/pelaksana kegiatan di daerah dengan petugas/pelaksana di pusat, sehingga beberapa kegiatan yang sulit dilaksanakan dan perlu direvisi dilaporkan sehingga capaian kegiatan tinggi;
- 3) Pengembangan kawasan sayuran dan tanaman obat serta tanaman buah dan florikultura dilakukan secara merata di setiap provinsi di Indonesia

dengan melakukan pembinaan /pendampingan penerapan teknologi budidaya yang baik dan benar (*Good Agricultural Practices/ GAP*), memperbanyak penangkar benih untuk menghasilkan benih bermutu sesuai spesifikasi yang ditetapkan, mengikutsertakan petani dalam pelatihan-pelatihan, melakukan sosialisasi dan pembinaan secara intensif dalam registrasi kebun dan lahan usaha, dan mengedukasi petani tentang pentingnya pertanian ramah lingkungan;

- 4) Melakukan operasi pasar dan pasar lelang guna mengurangi rantai pemasaran sehingga distorsi harga antara produsen dan konsumen tidak terlalu besar;
- 5) Membuat MoU antara Kementerian Pertanian dengan pemerintah daerah terkait dengan penggunaan lahan pertanian yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di daerahnya. Selain itu, membantu petugas dan petani dalam mendapatkan inovasi teknologi tepat guna dalam mengantisipasi dampak perubahan iklim dan *el-nino*;
- 6) Melakukan koordinasi yang lebih baik dan intensif dengan pihak terkait khususnya dalam proses penyediaan benih buah bersertifikat seperti para penangkar/produsen benih dan lembaga sertifikasi benih, sehingga ada jaminan ketersediaan benih bersertifikat secara tepat waktu, mutu dan jumlah;
- 7) Meningkatkan kompetensi SDM melalui pembinaan, penyuluhan, pelatihan, sosialisasi, apresiasi, bimbingan teknologi dan pelatihan manajemen baik di tingkat pusat maupun di daerah bekerjasama dengan instansi terkait;
- 8) Melakukan penyederhanaan/ revisi terhadap regulasi yang mendukung realisasi program/kegiatan;
- 9) Optimalisasi dan fasilitasi sarana prasarana penunjang pelaksanaan kegiatan pengamatan OPT dan DPI, pengembangan agens hayati dan biopestisida, serta sarana prasarana pendukung operasional laboratorium;
- 10) Menyediakan Sistem Informasi Manajemen (SIM) OPT hortikultura dan DPI yang terintegrasi;
- 11) Menyediakan sistem peringatan dini/EWS dalam rangka pengamanan produksi hortikultura dari serangan OPT dan DPI;
- 12) Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan petani terhadap identifikasi OPT, mengurangi penggunaan bahan kimia dalam sistem pengelolaan OPT hortikultura oleh petani, menyediakan bahan pengendalian OPT Hortikultura pada tingkat lapang yang bersifat ramah lingkungan (Agens Hayati ataupun biopestisida);

- 13) Penerapan SPI secara optimal;
- 14) Identifikasi CPCL di tahun sebelumnya, sehingga pelaksanaan kegiatan bisa di awal tahun;
- 15) *Reward and Punishment* diterapkan secara optimal dan inventarisasi dan penilaian aset dilaksanakan secara sistematis;
- 16) Melakukan inventarisasi aset di lingkup kerja Direktorat Jenderal Hortikultura; dan
- 17) Melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi secara periodik terkait kinerja dan pelaporan satker daerah.



## V. PENUTUP

Secara umum keberhasilan pencapaian kegiatan hortikultura disebabkan oleh adanya dukungan yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Hortikultura, yaitu; (1) pengaturan pola tanam berbasis kebutuhan riil, (2) penguatan kawasan penyangga Jabodetabek dan pengembangan sentra baru di luar Jawa, (3) inisiasi pembentukan korporasi, (5) mendorong penggunaan benih bermutu, (6) pemberian bimbingan teknologi (secara intensif dalam budidaya terutama dalam pengendalian OPT), penyuluhan, pelatihan, sosialisasi, apresiasi, pendampingan dan pengawalan kepada untuk meningkatkan kompetensi petugas maupun petani/pelaku usaha baik di tingkat pusat maupun di daerah.

Anomali iklim sangat mempengaruhi produksi komoditas hortikultura, untuk itu perlu dilakukan upaya dalam hal penyediaan sarana pertanian untuk mendukung produksi seperti pembuatan embung atau menyediakan teknologi tepat guna dalam mengantisipasi kondisi iklim (kelebihan hujan dan kekeringan).

Pencapaian kinerja pada Direktorat Jenderal Hortikultura merupakan hasil komitmen dan kerja keras dari pimpinan dan seluruh karyawan Direktorat Jenderal Hortikultura untuk mendapatkan hasil yang optimal sesuai dengan target yang telah direncanakan. Tidak lupa keberhasilan pembangunan hortikultura banyak ditentukan pula oleh peran pemangku kepentingan pembangunan hortikultura, baik di pusat maupun daerah diluar Direktorat Jenderal Hortikultura meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Swasta, Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Perguruan Tinggi, dan Petani. Oleh karenanya kerjasama yang harmonis, sinergis, dan terintegrasi selalu diharapkan agar pembangunan hortikultura dapat memberikan kontribusi yang positif pada peningkatan produksi hortikultura, pembangunan ekonomi nasional serta memperbaiki kesejahteraan petani hortikultura pada khususnya.